

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ratman, Desriza. *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktik Medik*, Bandung: Keni Media, 2014.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Kurniawan, Basuki. *Logika dan Penalaran Hukum*. Jakarta: LICENSI, 2021.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*. Surabaya: Rineka Cipta, 2005.

- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1999.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Edisi Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju, 2018.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 20. Jakarta: PT Intermasa, 1985.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Hadjon, Philipus M., Maria Farida Indrati, Ridwan HR, dan Yuliandri. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2024.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Cet. 2. Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2015.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Etika dan Hukum dalam Praktik Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. New York: Oxford University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

JURNAL

Putra, Sarsintorini. "Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Neliti* (2025).

Alimunthe, Dermina D. S. "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017).

Gani, Andika Wahyudi. "Penegakan Hukum dan Tindak Pidana: Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan terhadap Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks)." *Jurnal Juridical Analysis Ratio Decidendi of Rulings Against Law Enforcement of Banking Crimes Related Licensing XVII*, no. 222 (2022).

Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Jurnal Pemikiran Islam XVIII*, no. 2 (2017).

Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 6, no. 2 (2022).

Kurniawan, Arif. "Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak." *Journal Of Islamic Legal Studies* 11, no. 1 (2018).

Paendong, Kristiane. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).

Sinaga, Niru Anita, and Nurlaly Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020).

Sumawan, Putu. "Pengaruh Psikologis Hakim terhadap Ratio Decidendi dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Analisis Hukum* (2023).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 872 K/Pdt/2017

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 115/PDT/2016/PT.MTR

LAMPIRAN

A. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 115/PDT/2016/PT.MTR